Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 1 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Etnis Tionghoa dan Konflik Sosial di Surakarta: Analisis Historis Kerusuhan 1998

Moch Akbar Maulana

Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: akbarmaulana9339@gmail.com

*Korespondensi

Received: 06-10-2025, Revised: 16-06-2026, Accepted: 25-06-2026, Published: 30-06-2026

Abstrak

Penelitian ini membahas kerusuhan Mei 1998 di Surakarta dengan menekankan faktor penyebab, dinamika peristiwa, serta dampaknya terhadap etnis Tionghoa. Krisis moneter yang terjadi sejak akhir 1997 memicu ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, dan keresahan sosial yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan massal. Etnis Tionghoa menjadi target utama penjarahan, pembakaran, hingga kekerasan fisik dan seksual, yang meninggalkan trauma mendalam serta kerugian material yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer berupa arsip surat kabar lokal (Solopos dan Suara Merdeka) dipadukan dengan sumber sekunder berupa buku dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusuhan di Surakarta tidak dapat dipandang sebagai peristiwa spontan, melainkan terkait erat dengan kebijakan diskriminatif Orde Baru, kesenjangan sosial-ekonomi, serta lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas. Pasca peristiwa, komunitas Tionghoa menghadapi tantangan berupa hilangnya rasa aman, distrust terhadap pemerintah, serta keterpurukan ekonomi. Namun, muncul pula upaya rekonsiliasi berbasis komunitas, seperti di Kampung Pecinan Surakarta, yang berperan dalam membangun kembali harmoni sosial. Kajian ini menegaskan pentingnya penyelesaian struktural dan kultural untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Diskriminasi; Etnis Tionghoa; Kerusuhan Mei 1998; Surakarta

Abstract

This study examines the May 1998 riots in Surakarta by focusing on their causes, dynamics, and impacts on the Chinese Indonesian community. The monetary crisis that began in late 1997 triggered economic instability, mass unemployment, and social unrest, which escalated into large-scale riots. The Chinese Indonesians became the main targets of looting, arson, and physical as well as sexual violence, leaving deep psychological trauma and significant material losses. This research employs historical methodology through four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources consist of local newspapers (Solopos and Suara Merdeka), supported by secondary sources such as books and academic journals. The findings reveal that the Surakarta riots were not merely spontaneous incidents but were closely linked to the discriminatory policies of the New Order, socioeconomic disparities, and the state's failure to protect minority groups. After the riots, the Chinese community faced long-term challenges, including loss of security, distrust toward the government, and economic collapse. However, community-based reconciliation efforts, such as those in Surakarta's Chinatown, played a role in

rebuilding social harmony. This study highlights the importance of both structural and cultural approaches in preventing the recurrence of similar ethnic conflicts in the future.

Keywords: Chinese Indonesians; Discrimination; May 1998 Riots; Surakarta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Krisis multidimensional yang mengguncang Indonesia pada 1997–1998 merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam perjalanan sejarah kontemporer bangsa. Krisis moneter yang bermula di Thailand menjalar cepat ke Indonesia dan mengakibatkan kejatuhan nilai rupiah, inflasi tinggi, serta runtuhnya stabilitas ekonomi yang selama Orde Baru dianggap kokoh. Kondisi ini memperburuk kesenjangan sosial dan memicu kemarahan publik terhadap rezim Suharto yang dituduh korup, otoriter, dan gagal melindungi rakyat dari keterpurukan ekonomi. Ketidakpuasan sosial tersebut meletus dalam bentuk demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan massal, terutama pada bulan Mei 1998, yang akhirnya mendorong lengsernya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa (Syafrudin & Maiwan, 2023).

Salah satu ciri yang paling mencolok dari kerusuhan Mei 1998 adalah keterkaitannya dengan etnis Tionghoa. Peristiwa ini tidak hanya berupa penjarahan dan perusakan, tetapi juga diwarnai oleh kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa yang hingga kini masih meninggalkan trauma mendalam (Februandari, 2023). Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya posisi etnis Tionghoa dalam struktur sosial Indonesia, meskipun secara ekonomi mereka seringkali dipersepsikan sebagai kelompok yang relatif lebih mapan.

Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa, khususnya bagi komunitas Tionghoa. Peristiwa yang terjadi pada 13–15 Mei 1998 ini bertepatan dengan runtuhnya rezim Orde Baru di tengah krisis moneter Asia, gelombang demonstrasi mahasiswa, serta delegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto (Gomar et al., 2024). Krisis ekonomi yang membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi memperuncing kecemburuan sosial lama antara kelompok pribumi dan etnis Tionghoa yang sejak kolonial telah diposisikan sebagai minoritas dalam struktur ekonomi Indonesia. Akumulasi faktor politik, ekonomi, dan sosial ini meledak dalam bentuk kerusuhan massal yang menargetkan komunitas Tionghoa di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Medan, Surakarta, dan Semarang (Hikmawati, 2017).

Fenomena diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak era kolonial, pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan politik segregasi sosial yang memisahkan masyarakat pribumi, Eropa, dan Tionghoa dalam struktur sosial yang hierarkis (Santoso, 2021). Hal ini menciptakan jarak sosial sekaligus stigma bahwa orang Tionghoa lebih dekat dengan kekuasaan kolonial dibandingkan pribumi. Setelah kemerdekaan, meskipun secara formal mereka diakui sebagai warga negara Indonesia, diskriminasi tetap berlanjut. Pada masa Orde Baru, misalnya, kebijakan asimilasi yang ketat membuat ekspresi identitas Tionghoa dibatasi, termasuk larangan penggunaan bahasa dan simbol-simbol

kebudayaan Tionghoa di ruang publik. Dengan demikian, kerusuhan 1998 tidak bisa dilepaskan dari akar historis diskriminasi struktural yang panjang.

Kehidupan multietnis di Kota Surakarta sesungguhnya telah lama terjalin, bahkan sejak era kolonial ketika VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda memposisikan Surakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan (Santoso, 2021). Pada tahun 1998 kerusuhan berlangsung cukup brutal. Banyak toko, rumah, dan aset milik etnis Tionghoa dijarah dan dibakar, bahkan ada korban jiwa akibat kekerasan massa (Bong, 2017; Lindsey & Butt, 2018). Padahal, secara historis, komunitas Tionghoa di Surakarta memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi perkotaan, terutama di bidang perdagangan, industri batik, serta sektor jasa (Rustopo, 2018). Namun, kerusuhan Mei 1998 memperlihatkan betapa rapuhnya integrasi sosial yang selama ini tampak harmonis di permukaan, sehingga dalam situasi krisis, etnis Tionghoa kembali dijadikan kambing hitam.

Pasca-1998, banyak penelitian menyoroti upaya pemulihan trauma dan rekonsiliasi antar-etnis. Salah satunya adalah studi mengenai pemaafan pemerintah serta rakyat Surakarta yang menekankan pentingnya pengampunan sebagai mekanisme psikososial untuk memutus siklus trauma dan kebencian (Gomar et al., 2024). Rekonsilasi antar-etnis terbukti dapat menurunkan kecenderungan agresi, meningkatkan kepuasan hidup, serta memperbaiki relasi sosial antar kelompok yang pernah bertikai. Namun, kenyataannya, banyak korban masih menyimpan rasa takut dan tidak percaya terhadap masyarakat pribumi karena tidak adanya penyelesaian hukum yang tuntas terhadap pelaku kerusuhan (Noviyanti et al., 2019). Situasi ini menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak dapat hanya dibangun pada level individu, tetapi membutuhkan perubahan struktural, termasuk pengakuan negara atas tragedi kemanusiaan tersebut serta jaminan perlindungan terhadap minoritas.

Kajian mengenai etnis Tionghoa di Surakarta selain menyoroti pemulihan trauma dan rekonsiliasi antar-etnis ada juga penelitian dengan fokus yang beragam, salah satunya adalah penelitian yang membahas rekontestasi kultural etnis Tionghoa Kota Surakarta pada era Reformasi pasca pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 (Alam, 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa Surakarta kembali memperoleh ruang untuk mengekspresikan identitas budaya dan keagamaannya melalui berbagai aktivitas publik seperti perayaan Grebeg Sudiro, revitalisasi kawasan Pecinan Balong, serta pengembangan klenteng dan ruang budaya Tionghoa di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa komunitas Tionghoa telah menjadi bagian penting dari perkembangan sosial dan ekonomi Surakarta sejak masa kolonial, khususnya melalui kawasan Pecinan Balong, Ketandan, dan Pasar Gede yang berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat Tionghoa.

Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek rekontestasi budaya dan identitas etnis Tionghoa pada era Reformasi, sedangkan kajian mengenai pengalaman masyarakat Tionghoa Surakarta dalam menghadapi konflik sosial dan kerusuhan Mei 1998 beserta dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka masih belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji posisi etnis Tionghoa sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh konflik sosial di Surakarta pada tahun 1998. Perbedaan kajian terdahulu dengan kajian yang akan saya teliti yakni

saya akan menekankan analisis yang komprehensif tentang kerusuhan Mei 1998 di Surakarta dengan menekankan hubungan antara kebijakan diskriminatif Orde Baru, selain itu saya jugaakan meneliti mengenai dampak yang terjadi pasca kerusuhan 1998 terhadap etnis Tionghoa yang berada di Surakarta serta respon pemerintah terhadap kerusuhan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerusuhan Mei 1998 di Surakarta dengan menekankan pada faktor penyebab, dinamika peristiwa, serta dampaknya terhadap komunitas Tionghoa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman sejarah sosial Indonesia, khususnya mengenai hubungan antar-etnis dalam konteks krisis politik dan ekonomi sehingga untuk kedepannya diharapkan tidak terulang di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dimana penelitian ini melakukan 4 tahapan yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Untuk tahapan heuristik penulis mengumpulkan sumber primer berupa surat kabar Solopos edisi bulan Juli tahun 1998 dan Suara Merdeka edisi bulan Maret 1998 serta Juli 1999. Alasan penulis memilih sumber primer surat kabar Solopos dan Suara Merdeka, karena pada masa terjadinya peristiwa 1998 kedua surat kabar tersebut memberitakan secara detail bagaimana kerusuhan bisa terjadi serta kedua surat tersebut banyak memberitakan kerusuhan yang terjadi di Jawa Tengah dimana penulis akan menulis dengan lokus Surakarta dimana kota tersebut terletak di Jawa Tengah dan selain menggunakan sumber primer penulis juga menggunakan sumber sekunder seperti jurnal dan buku yang relevan.

Tahapan selanjutnya yakni kritik sumber, pada tahap ini penulis melakukan verifikasi terhadap sumber yang telah didapatkan untuk menguji kebenaran atau keabsahan dari suatu peristiwa 1998 tersebut. Kritik sumber yang dilakukan penulis ada 2 tahapan yakni kritik eksternal dan internal. Tahapan yang terakhir yakni interpretasi, dalam hal ini penulis mulai melakukan analisis data yang telah didapatkan untuk menemukan fakta yang akan dituangkan dalam bentuk historiografi agar menjadi sebuah penulisan yang berdasarkan fakta. Keterbatasan penulis dalam mengumpulkan sumber dimana banyak penelitian berupa jurnal maupun surat kabar yang lebih membahas Kota-Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dari pada Kota Surakarta.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kebijakan Asimilasi dan Diskriminasi Struktural Orde Baru

Pascakemerdekaan, status kewarganegaraan di Indonesia diatur melalui Perpu No. 3 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Kehadiran regulasi ini mendorong mayoritas masyarakat etnis Tionghoa untuk secara sadar memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) (Presiden Republik Indonesia, 1948). Seiring berjalannya waktu, muncul faktor-faktor yang mendorong asimilasi etnis Tionghoa dengan masyarakat mayoritas pribumi. Salah satunya mulai terasa pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya sejak diberlakukannya kebijakan pada tahun 1959. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang pedagang eceran asing untuk

berjualan di pedesaan. Kebijakan ini berdampak kepada banyak menyasar pedagang kecil dari etnis Tionghoa, karena memang mereka cukup dominan di sektor perdagangan lokal. Dari situ, mulai ada dorongan agar masyarakat Tionghoa lebih berbaur, mencari jalan hidup baru, dan berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat pribumi (Tempo, 2007). Dengan kata lain, kebijakan ini secara tidak langsung mendorong lahirnya proses asimilasi, meski tentu saja bagi sebagian orang hal ini juga terasa sebagai sebuah tekanan.

Pemerintahan Orde Baru setelah peristiwa 30 September 1965 menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Kelompok etnis ini kerap mendapat stigma sebagai pihak yang dianggap berorientasi ke Tiongkok dan identik dengan paham komunis. Mereka dicurigai mendukung gerakan politik kiri karena Republik Rakyat Tiongkok pada saat itu merupakan negara komunis. Akibatnya, muncul penyamarataan yang bersifat esensialis antara etnis Tionghoa dan komunisme (Santoso, 2021). Pada 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur praktik agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Instruksi tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk perayaan yang berkaitan dengan tradisi dan keagamaan Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan dalam ruang tertutup. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi sekaligus mengikis pengaruh kebudayaan Tionghoa, termasuk aspek kepercayaan, tradisi, adat, maupun agama(Aryani, 2022) .

Adanya kebijakan yang rasial pada masa Orde Baru, sebagaimana dikutipkan sebagai berikut: “Belum pernah sepanjang sejarah Republik, orang Tionghoa kaya di zaman Orde Baru. Belum pernah juga sepanjang sejarah, orang Tionghoa ditindas secara politik, kebudayaan, dan sosial separah di zaman Orde Baru.” Sebelum penulis membahas lebih jauh, penting untuk menegaskan terlebih dahulu adanya heterogenitas dalam komunitas Tionghoa. (Chong, 2018) menjelaskan bahwa kelompok orang Tionghoa yang disebut tidak pernah sekaya pada masa Orde Baru adalah mereka yang memperoleh kesempatan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai bagian dari kroni rezim, jumlahnya hanya beberapa puluh orang dari sekitar empat juta populasi Tionghoa.

Krisis Moneter 1997-1998 dan Eskalasi Kesenjangan Sosial Ekonomi

Krisis yang terjadi di Indonesia ini bermula ketika pada akhir tahun 1997 dimana nilai rupiah menurun terhadap dollar AS, sehingga menyebabkan banyaknya barang-barang yang harganya melambung tinggi, terlebih lagi banyak yang di PHK karena adanya krisis ini, sehingga menimbulkan tingginya tingkat pengangguran dan kriminalitas (Ramadhani et al., 2025). Berakhirnya masa jabatan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dengan pengunduran diri karena adanya tuntutan dari masyarakat serta mahasiswa, merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah dimana Soeharto telah menjabat selama 32 tahun dan berakhir dengan pengunduran dirinya, banyak hal yang menjadikan Soeharto lengser diantaranya yang paling mencolok adalah faktor ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya.

Faktor yang menyebabkan lengsernya Soeharto dari jabatan presiden menurut (Sari & Fakhruddin 2016), yakni pemicu nya melalui krisis ekonomi 1997–1998. Pada dasarnya dipicu oleh efek penularan dari Thailand yang memicu

ketidakseimbangan makroekonomi. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi sorotan, yakni kondisi fundamental makro, praktik kapitalisme yang disertai kepanikan, serta penularan kebijakan di kawasan Asia Timur, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi pada tahun 1998 bisa terjadi awalnya dikarenakan karena melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar AS, Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada 19 Maret 1998 mencapai level 8.450 per Dolar (Suara Merdeka, 1998). Dengan melemahnya nilai tukar rupiah dengan Dolar menjadikan Bulog mencabut subsidi kepada tepung terigu sehingga harga tepung terigu naik hingga 60% menjadikan harga sembako di pasar tradisional naik, seperti tepung terigu yang mencapai 3000/kg yang awalnya hanya 1800-2000/kg (Solopos, 1998c).

Menurut Data Badan Pusat Statistik mengenai jumlah penduduk etnis Tionghoa di Surakarta pada tahun 1998 relatif terbatas karena pada masa Orde Baru pencatatan etnis tidak dilakukan secara terbuka dalam publikasi kependudukan resmi. Namun demikian, berdasarkan Sensus Lokal Surakarta tahun 1966 tercatat terdapat 20.219 jiwa penduduk etnis Tionghoa yang tersebar di lima kecamatan di Kota Surakarta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa etnis Tionghoa merupakan salah satu komunitas minoritas terbesar di Surakarta dengan konsentrasi permukiman di kawasan Pecinan seperti Balong, Pasar Gede, dan sekitarnya. Keberadaan komunitas tersebut menjadikan etnis Tionghoa sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi Kota Surakarta menjelang terjadinya kerusuhan Mei 1998.

Kota Surakarta (Solo) memiliki kerentanan khusus yang membuatnya jadi titik rawan dalam kerusuhan Mei 1998. Pertama, konsentrasi usaha dan perdagangan milik etnis Tionghoa di pusat kota menciptakan ketimpangan ekonomi yang kasat mata antara masyarakat pribumi dan kelompok Tionghoa, sehingga ketika krisis moneter terjadi, sentimen kecemburuan sosial mudah dieksploitasi. Kedua, Solo sejak lama dikenal sebagai kota dengan tradisi politik jalanan dan aktivitas massa yang cukup aktif, yang memperbesar kemungkinan eskalasi ketika provokasi massa terjadi. Ketiga, institusi keamanan lokal di Solo menghadapi tantangan koordinasi dan respons cepat terhadap lonjakan massa, terutama ketika kerusuhan meluas ke permukiman warga, sehingga celah kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kerusuhan (Salim & Ramdhon, 2020). Dengan demikian, Solo bukan sekadar menjadi salah satu kota yang terpapar kerusuhan melainkan menjadi kota yang rentan terhadap pola “ruckus + sasaran etnis” melalui kombinasi faktor ekonomi, sosial-politik, dan kelemahan aparat.

Sebelum terjadinya kerusuhan Mei 1998, komunitas Tionghoa merupakan salah satu kelompok etnis penting dalam struktur sosial-ekonomi Kota Surakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, masyarakat keturunan Tionghoa terkonsentrasi di kawasan Pasar Gede, Balong, Coyudan, dan sekitarnya yang secara historis berkembang sebagai kawasan Pecinan (Alam, 2024). Selain berperan dalam sektor perdagangan, masyarakat Tionghoa juga terlibat dalam industri batik, jasa, dan distribusi barang kebutuhan pokok (Ratnasari et al., 2021). Keberadaan mereka telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi Kota Surakarta sejak masa kolonial.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia juga menyebabkan banyaknya kekerasan dan menurunnya keamanan bangsa. Akibat kondisi tersebut, muncul

desakan dari masyarakat untuk segera dilakukan pergantian kepemimpinan nasional guna mengatasi krisis ekonomi serta memperbaiki keadaan politik Indonesia. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup memicu keresahan massal di berbagai daerah. Di ibu kota, masyarakat melakukan penjarahan terhadap barang-barang yang dianggap dapat menunjang kelangsungan hidup. Aksi kriminalitas juga semakin marak, termasuk pembakaran yang dilakukan secara sewenang-wenang. Sasaran utama dari tindakan tersebut banyak diarahkan kepada etnis Tionghoa, yang selama ini dipersepsikan mendominasi perekonomian Indonesia(Solopos, 1998d).

Menurut (Solopos, 1998f) edisi 13 juli 1998 masalah utama kerusuhan tahun 1998 ini sebenarnya terjadi akibat kesenjangan sosial antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa. Kesenjangan ini diperparah oleh beberapa orang Tionghoa yang melakukan transaksi bisnis secara tidak jujur, yaitu melalui korupsi, manipulasi, monopoli maupun kolusi dengan pejabat pejabat pemerintahan tanpa memperlihatkan dampak buruknya terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di masa kepemimpinan Soeharto, gejala ini terus berkembang semakin luas dan hampir tak terkendali karena tidak adanya kontrol yang efektif.

Kondisi tersebut menciptakan sentimen anti-Tionghoa yang semakin mengakar dalam masyarakat. Etnis Tionghoa kerap dipandang sebagai simbol ketidakadilan ekonomi sekaligus kelompok yang menikmati perlindungan politik rezim. Kerusuhan Mei 1998 tidak hanya berkaitan dengan krisis moneter, tetapi juga erat kaitannya dengan konstruksi sosial-politik yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai "*middleman minority*" yang rentan menjadi kambing hitam saat terjadi krisis. Diskriminasi struktural yang berlangsung sejak Orde Baru memperkuat stereotipe negatif terhadap etnis Tionghoa, sehingga ketika terjadi krisis ekonomi 1997–1998, kebencian yang terakumulasi meledak dalam bentuk kekerasan massal. Dengan demikian, kerusuhan Mei 1998 bukanlah ledakan spontan semata, melainkan akumulasi dari ketidakadilan ekonomi, diskriminasi sosial, dan kegagalan negara dalam mengelola keragaman etnis (Solopos, 1998a) .

Beberapa kasus lain menyebutkan bahwa terjadi pemerkosaan yang dilakukan secara massal sehingga korban yang diperkosa tersebut hingga meninggal, dan perilaku keji ini dilakukan di depan keluarga korban sehingga banyak dari etnis Tionghoa yang mengalami trauma, ketakutan hingga kesedihan setelah mengalami kejadian tersebut (Hikmawati, 2017). Pada kerusuhan 1998 masih banyak etnis Tionghoa yang menjadi korban dan sampai sekarang beberapa mereka masih mengalami trauma mendalam dan beberapa dari mereka juga yang mampu pulih dari kondisi trauma tersebut (Salim & Ramdhon, 2020). Menurut (Solopos, 1998e) edisi 11 Juli 1998, menyimpulkan bahwa pola kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota kota besar memiliki pola yang sama, yakni dimana para pelaku kerusuhan juga merupakan kasus pemerkosaan. Perilaku keji ini yang di lakukan oleh pelaku menjadikan korban mengalami trauma sehingga banyak di antara mereka mengalami ketakutan berkepanjangan, kesedihan, bahkan gangguan psikologis pasca-peristiwa. Trauma ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, melainkan juga menimbulkan luka kolektif bagi komunitas Tionghoa yang merasa terancam dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Akibatnya, kerusuhan tersebut tidak hanya meninggalkan kerugian materil, tetapi juga membekas sebagai ingatan sosial yang sulit terhapus dalam sejarah hubungan antar-etnis di Indonesia.

Kerusuhan tersebut semakin diperburuk karena massa yang melakukan penjarahan pada toko dan bangunan milik etnis Tionghoa mereka juga merusak hingga dibakar oleh massa, sehingga pada masa itu etnis Tionghoa mengalami kerugian yang sangat besar (Noviyanti et al., 2019; Salim & Ramdhon, 2020). Menurut Solopos 1998, setelah dilakukan penyidikan terhadap dan kesaksian yang dikumpulkan tim relawan kasus kerusuhan, diduga pembakaran, penjarahan dan pemerkosaan atas para wanita etnis Tionghoa itu memang didalangi pihak tertentu dan terorganisir, Selain itu menurut M Thoriq Addibani SH, salah seorang aktivis Paguyuban Wong Solo (PWS) kepada wartawan, ia mengatakan bahwa "Tapi yang membedakan dengan pemulung umumnya, saat beraksi mereka sama sekali tidak mengesankan rasa takut. Meski ada tuan rumah, mereka tetap saja mengambil dan mengangkuti barang-barang milik warga etnis Tionghoa," (Solopos, 1998f).

Dampak Kerusuhan Terhadap Etnis Tionghoa Surakarta

Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang selama ini banyak beraktivitas di sektor perdagangan dan jasa. Sasaran utama kerusuhan tidak hanya berupa pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, dan tempat usaha milik warga Tionghoa, tetapi juga rumah-rumah pribadi yang berada di kawasan permukiman campuran. Berbagai aksi penjarahan, perusakan, dan pembakaran menyebabkan banyak keluarga Tionghoa kehilangan harta benda serta sumber mata pencaharian yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Penelitian Santoso menunjukkan bahwa kerusuhan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat Tionghoa Surakarta dan memaksa sebagian korban menghentikan aktivitas usaha mereka untuk sementara waktu akibat situasi keamanan yang tidak kondusif (Santoso, 2021).

Dampak kerusuhan juga dirasakan secara langsung oleh individu dan keluarga etnis Tionghoa yang menjadi korban kekerasan massa. Menurut salah satu korban yang dikutip dalam media Suara Surakarta adalah Sumartono Hadinoto, yang merupakan warga keturunan Tionghoa di Surakarta. Pada saat itu rumahnya menjadi sasaran perusakan dan penjarahan oleh massa. Dalam upaya menyelamatkan diri, ia bersama keluarganya terpaksa meninggalkan rumah melalui bagian belakang bangunan dengan bantuan warga sekitar dan kemudian mengungsi selama beberapa hari. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sasaran kerusuhan tidak hanya ditujukan pada aset ekonomi milik etnis Tionghoa, tetapi juga menciptakan ancaman langsung terhadap keselamatan dan keamanan keluarga-keluarga Tionghoa di Surakarta (Santoso, 2023).

Kerugian material, masyarakat etnis Tionghoa Surakarta mengalami dampak psikologis yang berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban mengaku mengalami trauma, rasa takut, dan kekhawatiran untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi maupun berinteraksi di ruang publik setelah kerusuhan berakhir. Salim dan Ramdhon menjelaskan bahwa trauma menjadi salah satu dampak paling menonjol yang dirasakan korban kerusuhan Mei 1998 di Surakarta, terutama bagi mereka yang menyaksikan secara langsung perusakan rumah, tempat usaha, dan lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan Mei 1998 tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi, tetapi juga

meninggalkan luka sosial dan psikologis yang membentuk pengalaman kolektif masyarakat etnis Tionghoa Surakarta pada era Reformasi (Salim & Ramdhon, 2020).

Selain dampak psikologis, kerugian ekonomi juga menjadi salah satu akibat paling nyata. Toko-toko, rumah, kendaraan, dan aset usaha milik etnis Tionghoa menjadi sasaran utama penjarahan dan pembakaran. Kerugian tersebut membuat banyak keluarga jatuh miskin secara tiba-tiba, kehilangan sumber mata pencaharian, serta menghadapi kesulitan membangun kembali usaha mereka. (Himawan et al., 2022) menegaskan bahwa peristiwa ini mengakibatkan kerugian materi yang luar biasa besar, sehingga banyak keluarga Tionghoa terpaksa menjual asetnya dengan harga rendah atau bahkan mengungsi sementara ke luar negeri. Kehilangan ini bukan sekadar urusan ekonomi rumah tangga, tetapi juga berdampak sistemik pada perekonomian nasional karena etnis Tionghoa dikenal memiliki kontribusi besar dalam sektor perdagangan dan distribusi. Dengan demikian, kerusuhan Mei 1998 menciptakan gejolak ekonomi yang memperburuk krisis moneter yang saat itu tengah melanda Indonesia.

Dari sisi sosial-politik, kerusuhan 1998 meninggalkan warisan berupa hilangnya rasa aman dan runtuhnya kepercayaan etnis Tionghoa terhadap negara maupun masyarakat mayoritas. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung justru dianggap gagal memberi perlindungan. Akibatnya, muncul distrust yang meluas, baik terhadap aparat negara maupun masyarakat luas, karena etnis Tionghoa merasa tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga dijadikan kambing hitam dalam ketegangan sosial-ekonomi. Penelitian (Bilven et al., 2022) menunjukkan bahwa pengalaman eksklusivitas sebagai korban justru memperkuat identitas etnis Tionghoa dan melemahkan identitas nasional Indonesia, yang pada gilirannya mempersulit rekonsiliasi antar kelompok. Fitriani (2021) juga menekankan bahwa persepsi diskriminasi struktural pasca-kerusuhan masih terus membayangi kehidupan politik etnis Tionghoa, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam bersikap di ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerusuhan tidak hanya merusak tatanan sosial saat itu, tetapi juga meninggalkan warisan panjang berupa polarisasi, keterasingan, dan perasaan terpinggirkan yang terus memengaruhi relasi etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia hingga masa kini.

Respon dari para aparat sendiri setelah terjadinya kerusuhan 1998 di Surakarta yang telah merugikan beberapa korban yang telah dijarah, diperkosa dan toko mereka di rusak serta dibakar yakni Polresta Solo mengalami kesulitan dalam mengusut siapa dan bagaimana sebenarnya pelaku kerusuhan di solo 14-15 Mei silam, sebab bukti dan fakta yang didapatkan Polresta Solo belum cukup kuat. Menurut Kapolresta Solo, letkol Solo, mereka telah menghubungi seluruh Kecamatan di Solo dan bertemu dengan warga, tokoh masyarakat dan alim ulama untuk memberikan kesaksian kepada Kapolresta Solo tersebut, meskipun para polisi telah memberikan jaminan keamanan bagi para warga yang memberikan kesaksian atas kejadian tersebut, tetapi belum banyak warga yang berani melaporkannya. “Saya menjamin keamanan sepenuhnya 100% bagi warga yang melapor” (Solopos, 1998b).

Respon dari Pemerintah Daerah Solo melalui Kepala Bagian Perekonomian, Amiruddin Alie Hasan, menegaskan bahwa bantuan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya dialokasikan bagi koperasi dan pengusaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria utama penerima bantuan adalah mereka yang

terpaksa menghentikan operasional usahanya akibat menjadi korban langsung dalam kerusuhan pertengahan Mei 1998, serta telah terdaftar sebagai anggota koperasi. Heru Haryanto SH, Kepala Bagian Humas Pemda Solo, menambahkan bahwa bantuan tidak berlaku jika penutupan usaha disebabkan oleh krisis moneter, bukan karena kerusuhan. Prosedur resmi juga mewajibkan pengusaha untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan kepada Departemen Koperasi (Solopos, 1998g).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemda Solo untuk memulihkan perekonomian kota yang nyaris lumpuh pasca-kerusuhan. Sebanyak 102 pengusaha korban kerusuhan telah menerima pinjaman lunak dari 13 BUMN dengan total nilai mencapai Rp 978 juta. Dana ini bersumber dari penyisihan 1%–2% laba beberapa BUMN dan memiliki masa pinjaman relatif singkat, yaitu 3 hingga 6 bulan. Mengingat terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pengusaha yang membutuhkan, Heru menekankan pentingnya skala prioritas dalam penyaluran bantuan (Solopos, 1998g).

Langkah ini merupakan salah satu upaya strategis Pemda dalam menangani tiga isu utama pasca-kerusuhan: pengadaan sembako, kelancaran distribusi, dan revitalisasi perekonomian lokal. Dengan fokus pada pemulihan sektor usaha kecil dan koperasi, diharapkan roda perekonomian Kota Solo dapat kembali berputar dan membangkitkan kepercayaan masyarakat, khususnya para pengusaha yang menjadi tulang punggung perekonomian kota (Solopos, 1998g).

Mahasiswa sebagai aktor gerakan reformasi juga memainkan peran penting di Surakarta menjelang dan selama kerusuhan Mei 1998. Sejak awal tahun 1998, kampus-kampus seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sudah menjadi titik mobilisasi aksi protes terhadap pemerintahan Orde Baru, dan pada 14–15 Mei demonstrasi mahasiswa di Solo semakin diperluas oleh massa sipil non-mahasiswa (Aji, 2022). Dalam banyak kasus, massa perusuh menyamar atau bergabung dengan demonstran mahasiswa, sehingga pembauran antara aksi intelektual dan aksi kerusuhan menjadi kabur. Partisipasi mahasiswa menjadikan aspek kerusuhan tidak bisa dilepaskan dari dinamika tuntutan politik dan keterlibatan sipil, sehingga analisis terhadap kerusuhan Solo tidak lengkap tanpa mempertimbangkan bagaimana gerakan mahasiswa menjadi jembatan transisi dari protes menjadi kerusuhan (Nugroho et al., 2022).

Rekonsiliasi Terhadap Etnis Tionghoa Surakarta

Terjadinya tragedi 1998 yang merupakan peristiwa pahit, trauma yang dialami masyarakat Tionghoa masih membekas dalam di kalangan masyarakat etnis Tionghoa Indonesia ketika mengingat kembali tragedi kerusuhan Mei 1998 (Gomar et al., 2024; Salim, 2019). Luka psikologis yang dalam ini tidak hanya menjadi memori personal, tetapi telah menjelma menjadi warisan sosial antar-generasi yang menggarisbawahi rapuhnya harmoni sosial dalam masyarakat multietnis selama situasi krisis. Berangkat dari kondisi tersebut, upaya sistematis untuk mencegah terulangnya konflik serupa, khususnya yang melibatkan ketegangan antara etnis Tionghoa dan Jawa sebagai kelompok mayoritas, menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Untuk itu, diperlukan suatu resolusi konflik yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan sosial dan meminimalisir potensi gesekan di masa depan

(Bilven et al., 2022). Pendekatan resolusi konflik semacam ini harus mencakup aspek struktural maupun kultural, termasuk penguatan institusi sosial, pendidikan multikultural, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Salah satu contoh nyata dari penerapan resolusi konflik berbasis komunitas dapat ditemui di Kampung Pecinan, Kelurahan Sudiropradjan, Surakarta. Kawasan ini terletak di sekitar Pasar Gede Harjonagoro, yang secara historis dan kultural merupakan pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Tionghoa Solo sekaligus ruang interaksi dengan masyarakat Jawa (Rustopo, 2018). Sebagai wujud nyata resolusi konflik pasca-1998, Kampung Pecinan tidak sekadar menjadi simbol kehadiran etnis Tionghoa, tetapi juga telah bertransformasi menjadi laboratorium hidup untuk koeksistensi dan rekonsiliasi melalui berbagai mekanisme. Berbagai bentuk upaya dilakukan di sini, mulai dari dialog budaya antarkelompok, kegiatan seni dan kuliner bersama, hingga inisiatif ekonomi kolaboratif yang melibatkan warga dari berbagai latar belakang (Jannah et al., 2024). Transformasi ini menunjukkan bagaimana ruang urban dapat berfungsi sebagai wadah rekonstruksi hubungan sosial pasca-konflik melalui praktik keseharian yang inklusif.

Upaya-upaya tersebut pada dasarnya merupakan strategi kultural untuk memperkuat modal sosial dan membangun saling pengertian (mutual understanding) yang selama ini mungkin terabaikan. Dengan menjadikan ruang publik seperti Kampung Pecinan sebagai area netral yang inklusif, masyarakat dari kedua etnis dapat berinteraksi secara setara, mengikis prasangka, dan secara bertahap membangun memori bersama yang positif (Alamsyah et al., 2019). Pendekatan semacam ini dianggap lebih efektif dan berjangka panjang dibandingkan resolusi konflik yang bersifat formal-institusional semata, karena ia tumbuh secara organik dari bawah (grassroot) dan mengakar pada kehidupan sehari-hari warga. Dengan demikian, Kampung Pecinan Sudiropradjan tidak hanya sekedar lokasi geografis, melainkan sebuah bukti nyata bahwa pencegahan konflik dapat dibangun melalui penguatan kohesi sosial dan praktik hidup berdampingan secara damai dalam keseharian, sekaligus menjadi model rekonsiliasi berbasis komunitas yang dapat diadopsi di daerah lain di Indonesia.

Kesimpulan

Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta merupakan puncak dari akumulasi krisis ekonomi, diskriminasi struktural, dan lemahnya peran negara dalam melindungi kelompok minoritas. Etnis Tionghoa tidak hanya mengalami kerugian materi yang besar, tetapi juga trauma psikologis mendalam akibat kekerasan, termasuk pemerkosaan massal yang dilakukan secara terorganisir. Peristiwa ini membuktikan bahwa diskriminasi yang mengakar sejak masa kolonial hingga Orde Baru masih membayangi kehidupan sosial-politik Indonesia. Pasca peristiwa, meskipun ada berbagai upaya pemulihan, seperti bantuan pemerintah dan inisiatif rekonsiliasi berbasis komunitas, kepercayaan masyarakat Tionghoa terhadap negara dan kelompok mayoritas tetap rapuh. Penelitian ini menekankan bahwa rekonsiliasi yang sebenarnya hanya dapat terwujud melalui pengakuan negara, penegakan hukum yang adil, serta penguatan kohesi sosial berbasis kesetaraan. Dengan demikian, tragedi 1998 harus menjadi pelajaran penting agar diskriminasi etnis tidak lagi menjadi pemicu konflik sosial di Indonesia.

Referensi

Aji, D. K. (2022). *Reformasi di Simpang Tiga Pabelan: Aksi Demonstrasi Mahasiswa Muslim di Solo, 1998.* Skripsi. Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.

Alam, M. B. S. (2024). *Rekontestasi Kultural Etnis Tionghoa Kota Surakarta di Era Reformasi (Cultural Recontestation of Chinese Ethnicity in Surakarta City During the Reformation Era)*. *24*(1), 86–99. https://doi.org/10.20473/mozaik.v24i1.49718.

Alamsyah, D., Avatara, S. P.-, & 2019, undefined. (2019). Harmonisasi hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di Surabaya pada masa kerusuhan Mei 1998. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 7*(1), 1-9. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/27422.

Aryani, M. K. (2022). Inpres No 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, *2*(2), 1–12. https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.21627.

Bilven, B., Nyúl, B., Relations, A. K.-I. J. of I., & 2022, undefined. (2022). Exclusive victimhood, higher ethnic and lower national identities predict less support for reconciliation among native and Chinese Indonesians through mutual. *International Journal of Intercultural Relations, 19,* 262-273. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.10.011.

Bong, S. A. (2017). *Trauma, memory and transformation: Southeast Asian experiences*. Strategic Information and Research Development Centre.

Chong, W. (2018). *Chinese Indonesians in post-Suharto Indonesia: Democratisation and ethnic minorities*. Hong Kong University Press.

Februandari, A. (2023). *Power and discrimination in a space: the role of cultural built heritage in identity construction of Chinese Indonesians*. Thesis. Newcastle University. http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/5864.

Fitriani, E. (2021). Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral relations between Indonesia and China in the onset of the 21st century. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, *10*(2), 183–202. https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437.

Gomar, N., Pengukuran, E. H. J. P. dan, & 2024, undefined. (2024). Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi: JPPP, 13(1), 43-54.* https://doi.org/10.21009/JPPP.131.06.

Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, *2*(2), 337-364. https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76.

Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 riots in Indonesia: Civilians and their untold memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *41*(2), 240-257. https://doi.org/10.1177/18681034221084320.

Jannah, I., Sejarah, R. R.-A. J. P., & 2024, undefined. (2024). Sejarah Sosial Etnis Tionghoa di Kabupaten Sampang Pasca Kerusuhan 1998. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 15*(2). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/60903/46731.

Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.

Sinar Merdeka (1998, March 19). *Mata Uang Asia Tak Terkendali*. Sinar Merdeka 1998, VI.

Noviyanti, N., Puji, R. P. N., & Hartanto, W. (2019). Gerakan Reformasi 1998 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember (Pengrusakan Toko Milik Etnis Cina). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 3*(2), 1-5.

Nugroho, D. A., Muslikh, M., & Andriyanto, A. (2022). Keterlibatan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) Cabang Surakarta Pada Peristiwa Reformasi 1998 di Kota Solo. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, *2*(2), 45-55.. https://online-journal.unja.ac.id/siginjai/article/view/21536.

Presiden Republik Indonesia, (1948). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia*. Sekretaris Negara Republik Indonesia

Ramadhani, M. R., Ramadhani, R., & Rahmah, N. (2025). Peristiwa Pengkudetaan Presiden Soeharto Pada Tahun 1998: Studi Pemikiran KH Maimoen Zubair. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(7), 1-15. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2644.

Ratnasari, D. M., Sutiyah, S., & Kurniawan, D. A. (2021). Keharmonisan Pedagang Pasar Gede Tahun 1998 Sebagai Materi Pengayaan Pembelajaran Sejarah SMA. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, *21*(1), 121–135. https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12997.

Rustopo. (2018). *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa.* Ombak Bekerjasama dengan Yayasan Nabil.

Salim, L., & Ramdhon, A. (2020). Dinamika Konflik Kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta Melalui Perspektif Korban. *Journal of Development and Social Change*, *3*(1), 58-70.

Santoso, A. (2021). *Dampak Kerusuhan Mei 1998 terhadap Perekonomian Masyarakat Etnis Tionghoa di Surakarta*. Skripsi. STKIP PGRI Pacitan.

Santoso, A. (2023). *Cerita Sumartono, Warga Keturunan Tionghoa Korban Kerusuhan Mei 1998, Jebol Tembok Rumah untuk Selamatkan Diri*. https://surakarta.suara.com/read/2023/05/19/152435/cerita-sumartono-warga-keturunan-tionghoa-korban-kerusuhan-mei-1998-jebol-tembok-rumah-untuk-selamatkan-diri. Diakses tanggal 5 September 2025.

Sari, P. K., & Fakhruddin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, *1*(2), 377-388.

Solopos. (1998a, July 1). Menyikapi Kegelisahan WNI keturunan Cina. *1998*.

Solopos. (1998b, July 8). Polresta kesulitan usut dalang kerusuhan. *1998*.

Solopos. (1998c, July 8). Subsidi dicabut, harga terigu naik 60%. *1998*.

Solopos. (1998d, July 10). Dalang kerusuhan dibeber pekan depan. *1998*.

Solopos. (1998e, July 11). Kasus kerusuhan segera terkuak. *1998*.

Solopos. (1998f, July 13). Seputar sebutan Cina dan Tionghoa. *1998*.

Solopos. (1998g, July 14). Khusus untuk korban kerusuhan: Bantuan Rp 978 juta. *1998*.

Solopos. (1998h, July 17). Penjarahan gaya pemulung dikeluhkan warga Tionghoa. *1998*.

Syafrudin, I., & Maiwan, M. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ Press.

Tempo. (2007). *Peraturan yang menggusur Tionghoa.* https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/124735/peraturan-yang-menggusur-tionghoa. Diakses tanggal 5 September 2025.